



**KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
Patriandi Nuswantoro<sup>1</sup> dan Taniro Jaya<sup>2</sup>**

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih  
Indonesia<sup>1</sup> dan Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Terbuka<sup>2</sup>  
patriandi12@gmail.com<sup>1</sup> dan tanirojaya@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak**

**Latar belakang:** Jumlah koperasi dan kelompok usaha mikro kecil menengah dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar ternyata perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan.

**Tujuan penelitian:** Untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

**Metode penelitian:** Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti merupakan *key instrument* dalam penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan *purposive sampling*.

**Hasil penelitian:** Besaran dan tujuan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan banyak program kerjasama yang bergerak di bidang usaha perdagangan kopi yang telah diekspor ke beberapa negara. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan UMKM relatif sudah cukup. Karakteristik lembaga pelaksana dapat dibagi menjadi pembina, penyuluh dan pendamping. Sikap para pelaksana sangat antusias dan berusaha sungguh-sungguh, dan keberadaannya direspon positif oleh pengurus koperasi dan UMKM. Komunikasi antar organisasi yang bekerja sama dengan mitra telah melakukan sedikit upaya pengembangan KUMKM dan sangat terjalin dengan baik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik telah berkembang sangat baik, seiring dengan meningkatnya tingkat penerimaan masyarakat dengan indikasi jual harga kopi yang cenderung meningkat dan stabil, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional.

**Kesimpulan:** Tingkat keberhasilan program di lihat dari banyaknya koperasi-koperasi terutama yang bergerak dibidang usaha perdagangan kopi telah dapat melakukan ekspor ke beberapa negara. Faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah adalah respon positif masyarakat, adanya kesadaran publik menerima kebijakan dan sikap publik menerima dan melaksanakan kebijakan. Faktor kendala implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah adalah minimnya anggaran dan fasilitas dan persepsi yang salah di masyarakat.

**Kata kunci:** Penerapan, Perkembangan, Kooperatif, UMKM

**Abstract**

**Background:** The number of cooperatives and groups of micro, small and medium enterprises and the absorption capacity of labor which is quite large is still far from being expected.

**Research purposes:** To assist the implementing committee in the process of selecting (selection) prospective village heads (registrants), through the help of an information system and to assist the process of processing values and numbers mathematically and automatically with the system, through a decision making based on the theory of the Weighted Product method. and Profile Matching, so that the correct decision is obtained.

**Research methods:** The research design used is a qualitative approach. The researcher is the key instrument in qualitative research. The study used purposive sampling.

**Research results:** The magnitude and objectives of the policy have been implemented with the success rate of many cooperation programs engaged in the coffee trade business which have been exported to several countries. The human resources involved in the development of MSMEs are relatively sufficient. The characteristics of implementing agencies can be divided into; Coach, Counselor and Assistant. The attitude of the implementers was very enthusiastic and made an earnest effort, and their existence was responded positively by the management of cooperatives and SMEs. Communication between organizations that work with partners has made little effort to develop KUMKM and is very well established. The Economic, Social and Political Environment has developed very well, along with the increasing level of public

---

*acceptance with indications of selling coffee prices that tend to increase and are stable, both in the local market and in the international market.*

**Conclusion:** *The success rate of the program can be seen from the number of cooperatives, especially those engaged in the coffee trading business, which have been able to export to several countries. The driving factors for the implementation of the cooperative development policy, micro, small and medium enterprises in Central Aceh District are; Positive community response; There is public awareness to accept the policy; and The attitude of the public to accept and implement the policy. Factors constraining the implementation of cooperative development policies, micro, small and medium enterprises in Central Aceh District are; lack of budget and facilities and wrong perceptions in society.*

**Keywords:** *Implementation, Development, Cooperative, MSME*

---

Diterima: 26-11-2021; Direvisi: 29-11-2021; Disetujui: 15-12-2021

## PENDAHULUAN

Sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah (Salamun, 2022), namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap koperasi (Fikri et al., 2021) dan kelompok usaha mikro kecil menengah tersebut (Firmanto, 2021). Implementasi kebijakan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Wibowo, 2021) serta dalam hubungan antara pusat dengan daerah (Hermawati, 2021). Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus (Firdaus et al., 2021) dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muammar, 2021).

Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, pembinaan terhadap kelompok koperasi, usaha mikro kecil menengah perlu menjadi perhatian (Saraswati et al., 2021). Pembinaan terhadap kelompok koperasi, usaha mikro kecil menengah bukan hanya menjadi tanggung jawab (Sunardi, 2021) Pemerintah Pusat tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Abdullah, 2016). Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi internal koperasi (Angriani & As' ari, 2021), usaha mikro kecil menengah. Koperasi satu-satunya badan usaha yang berlandaskan azas kekeluargaan. Dalam perekonomian Indonesia peran pemerintah dalam rangka pembinaan koperasi bertujuan untuk mendekatkan perhatian pemerintah (Suparna Wijaya & Ramadhanty, 2021), mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut untuk mewujudkan peran pemerintah dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan (Roza & Arliman, 2018) serta kemandirian keuangan usaha masyarakat yang berlandaskan azas kekeluargaan (Ardianti, 2021).

Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, pembinaan terhadap kelompok koperasi, usaha mikro kecil menengah perlu menjadi perhatian (Ryan, 2021). Pembinaan terhadap kelompok koperasi, usaha mikro kecil menengah bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah harus melibatkan seluruh komponen di daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan

pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah periode 2018-2022 salah satu misinya adalah mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. melalui misi ini diharapkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dapat melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktivitas ekonomi baik itu disektor pertanian, peternakan, wisata, industri-kreatif dan sebagainya tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Keberadaan koperasi di Kabupaten Aceh Tengah di masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggota, dan perekonomian masyarakat sekitar pada umumnya. Keberadaannya mampu memotong mata rantai jeratan rentenir yang berada di hampir setiap kampung. Usaha membangun kesadraan masyarakat di bidang ekonomi dilakukan untuk menumbuh kembangkan wadah perekonomian kampung berupa badan usaha milik kampung. Pemerintah Daerah melalui dinas mendampingi dan mendukung keberadaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan penyelenggaraan program pelatihan pengelolaan dan manajemen keuangan berbasis syariah yang mendukung kegiatan pendirian koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah.

Faktor penyebab belum berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Aceh Tengah diduga antara lain besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia dan terbatasnya dukungan modal.

Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi diduga adalah disebabkan oleh tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi, rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia pembina koperasi.

Keadaan itu disebabkan oleh masalah klasik yang dihadapi di dalam koperasi dan UMKM itu sendiri yaitu (a) rendahnya kualitas SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kewirausahaan para pelaku koperasi dan UMKM; serta (c) terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi.

Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang benar (best practices) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh

Tengah dan menganalisis secara komprehensif faktor pendorong dan kendala kebijakan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kebijakan program pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Aceh Tengah, memberikan satu topik baru yang dapat dijadikan sebagai salah satu kajian pengembangan ilmu administrasi publik dan sebagai tambahan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah terutama oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data bukan hanya merupakan tindak lanjut logis dari pengumpulan data, tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data penelitian yang berhasil di himpun berdasarkan jawaban informan penelitian berdasarkan hasil wawancara. Data primer berdasarkan informan yang berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pihak pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah; 1) Kabid Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bapak Jamaludin, SE; 2) Kasi Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Said Zulkarnain Al Idrus, S.T; 3) Kasi Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah Ibu Sudarmi, SE; 4) Beberapa Pengurus koperasi; Bapak Rizwan Husien, SE, Ak (Ketua Pengurus KBQ Baburayan); Bapak Ara Siberani (Ketua KSU Arinagata); Juandika Suhra (Bendahara KOPEPI Ketiara); 5) Beberapa Pengurus usaha kecil menengah: Bapak Armiyadi S.Hut (Pimpinan ASA Coffee); Bapak Mila Musri (*Style taylor*); M.Amin Diko (Bengkel Elektro); 6) Ketua Dekopin Bapak Munzir, SE. MM. Dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan berkaitan dengan implementasi kebijakan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah sebagai upaya implementasi tersebut di dasari pada:

#### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kebijakan merupakan kaidah, arahan, paduan ataupun ketentuan yang harus dijadikan pedoman, hal tersebut dipergunakan sebagai petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah atau pegawai. Istilah kebijakan sendiri penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan. Kebijakan pengembangan yang dilakukan dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan dan telah dapat diperoleh hasil yang dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terutama mereka yang bergerak di bidang perdagangan kopi. Tingkat keberhasilan program dapat di lihat dari banyaknya koperasi-koperasi terutama yang bergerak dibidang usaha perdagangan kopi telah dapat melakukan ekspor ke beberapa

Negara yang meliputi Ekspor Kopi ke negara tujuan: Jerman, Amerika, Jepang, Belgia, Kanada, China, Korea dan Australia.

Kelembagaan koperasi telah dibina dan dilatih dengan baik dan telah dapat membuat laporan keuangan dan manajemen yang baik. Pada tahun 2019 telah terwujud Koperasi terbaik peringkat Nasional yaitu Koperasi KBQ Baburrayan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan hasil telah diperoleh 24 Koperasi Bersertifikat Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Sumberdaya yang ada dalam keterlibatan pengembangan yang dilakukan dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan yang ada dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 52 orang terdiri dari tamat SMA 18 orang, tamat Diploma 2 orang, tamat Sarjana 24 orang dan tamat Magister 8 orang. Jumlah pegawai tersebut juga dipenuhi oleh tenaga/staf nonPNS yang mencapai 92 orang.

Sumber daya manusia dalam implementasi PROGRAM pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah diposisikan sebagai pembina; pendamping dan penyuluh. Peran yang dilakukan masing-masing telah terdistribusi dengan baik hingga dapat mengimplementasikan program.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya *financial* dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumberdaya *financial* yang sangat terbatas menjadi kendala dalam merealisasikan program. Hal serupa penelitian yang dikemukakan Nova (2017) faktor sumber daya baik manusia, financial dan sarana yang masih sangat kurang mendukung program pengembangan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam pengimplementasian program pengembangan agen pelaksana merupakan motor penggerak dalam menjalankan program-program pengembangan. Dukungan karakteristik agen pelaksana diharapkan melahirkan kelembagaan koperasi sehingga dapat dipercaya baik oleh anggotanya, masyarakat dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga informal dan nonformal. Wirausahawan muda yang handal dan dapat bersaing didalam dunia usaha dan tersedianya lapangan pekerjaan yang menjanjikan.

### **Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Kesiapan para pelaksana kebijakan pengembangan program tidak dapat memilih untuk tidak bersedia melaksanakan tugas. Loyalitas sebagai pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan terlaksananya program tersebut. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi yang terjalin oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan organisasi lain yang menjadi mitra dalam pengembangan meliputi: DEKOPINDA (Dewan Koperasi Daerah) Kabupaten Aceh Tengah; FairTrade; Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah; DPRK Aceh Tengah;

Dinas Koperasi dan UKM Aceh; DPRA; Kementerian Koperasi dan UKM RI; LPDB-KUMKM; Perbankan dan Instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Komunikasi yang berjalan baik dengan berbagai pihak menjadi respon positif dari gerakan koperasi dan berbagai kalangan. Komunikasi yang terjalin sangat baik dirasakan oleh pelaku koperasi dan UMKM di bidang perdagangan kopi.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Keberadaan secara ekonomi, sosial dan politik sangat berkembang terutama dirasakan oleh para pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan kopi dan anggota koperasi ini juga adalah petani kopi. Pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik keberadaan program pengembangan telah berkembang dengan sangat baik, seiring dengan meningkatnya taraf pendapatan masyarakat dengan indikasi penjualan harga kopi yang cenderung stabil baik di tingkat lokal maupun sdipasaran internasional. Dampak pengembangan tidak hanya dirasakan oleh para anggota dan pelaku usaha saja. Dukungan pemerintah sangat jelas dengan memisakan dari induknya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk berdiri sendiri menjadi Dinas Koperasi dan UMKM.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah dapat diuraikan meliputi:

### **Respon Positif**

Respon tersebut tidak hanya pada para pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Aceh saja, namun para anggota juga ikut merasakan kehadiran program pengembangan tersebut. Hal ini ditandai dengan kesejahteraan anggota yang menjadi tujuan atau keberadaan koperasi yang bersama-sama membangun dan bersama mensejahterakan anggota. Begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah seiring dengan berkembangnya Koperasi di bidang Perdagangan Kopi, ikut pula tumbuh dengan bentuk Usaha yang masih pengoptimalan hasil pertanian kopi, olahan kopi, kemasan kopi, hingga usaha *cafe* yang langsung pada konsumen.

Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; kesadaran dalam menerima bimbingan dan arahan dari pengembangan program Dinas, merupakan unsur yang harus ada pada setiap Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Masyarakat mulai sadar akan arti pentingnya kebersamaan dalam sebuah organisasi untuk bekerjasama dalam peningkatan ekonomi keluarganya yaitu dengan cara berkoperasi dan masyarakat juga dapat mengembangkan dirinya dalam sebuah usaha yang harus ia tekuni dan jalani untuk masa depannya setelah seringnya mendapatkan informasi, pelatihan dan permodalan.

### **Sikap Menerima dan Melaksanakan Kebijakan**

Tersedianya lembaga-lembaga yang dapat memberikan peluang pengembangan usaha yang telah di bina oleh dinas dalam memperoleh bantuan sarana dan prasarana pendukung juga lebih mudah untuk mendapatkan modal kerja. Masyarakat juga dapat mengembangkan dirinya dalam sebuah usaha yang harus ditekuni dan jalani untuk masa depannya setelah seringnya mendapatkan informasi, pelatihan dan permodalan.

Faktor kendala implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Anggaran dan Fasilitas**

Dibidang koperasi dan UKM dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, promosi, pengadaan dan pelatihan sangat terbatas dari segi pendaanaan maupun dari fasilitas. Dinas Perdagkop dan UKM dapat membentuk PLUT di Kabupaten Aceh Tengah, agar dapat memfasilitasi pengadaan bahan baku kemasan untuk semua pengusaha tertuma yang menggunakan kemasan almunium poil maupun kertas sehingga mengurangi pengeluaran (*cost*) untuk pengadaan bahan baku tersebut dan dapat mengurangi harga jual bubuk kopi Arabica sehingga penjualan lebih lancar lagi kedepannya.

### **Persepsi masyarakat**

Kecenderungan masyarakat masih banyak ditemukan bahwa setiap program yang di lakukan oleh pemerintah mereka beranggapan koperasi tempat untuk mendapatkan bantuan dan masalah koperasi adalah tanggung jawab pengurus/pengelola bukan merupakan tanggung jawabnya.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pengembangan yang dilakukan telah dapat diperoleh hasil dan dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terutama mereka yang bergerak di bidang perdagangan kopi. Tingkat keberhasilan program di lihat dari banyaknya koperasi-koperasi terutama yang bergerak dibidang usaha perdagangan kopi telah dapat melakukan ekspor ke beberapa negara. Pada kelembagaan koperasi telah dapat membuat laporan keuangan dan manajemen yang baik. Jumlah sumber daya yang terlibat dalam pengembangan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah relatif telah cukup. Karakteristik agen pelaksana dibedakan menjadi; pembina, penyuluh dan pendamping. sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana pengembangan program sangat antusias dan berupaya sungguh dan keberadaanya direspon positif oleh pengurus koperasi dan UMKM. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang terjalin oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan organisasi lainya yang menjadi mitra telah banyak dilakukan dalam upaya pengembangan terjalin sangat baik dan dirasakan oleh pelaku dan pengiat koperasi dan UMKM di bidang perdagangan kopi. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik program pengembangan telah berkembang dengan sangat baik, seiring dengan meningkatnya taraf pendapatan masyarakat dengan indikasi penjualan harga kopi yang cenderung stabil baik di tingkat lokal maupun di pasar internasional.

Faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah adalah respon positif masyarakat. Adanya kesadaran publik menerima kebijakan; dan Sikap publik menerima dan melaksanakan kebijakan. Faktor kendala implementasi kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Aceh Tengah adalah minimnya anggaran dan fasilitas dan persepsi yang salah di masyarakat.

## **BIBLIOGRAFI**

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–93.
- Angriani, V., & As' ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129.
- Ardianti, S. R. (2021). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Koperasi Serba*

- Usaha: Studi deskriptif di Koperasi Serba Usaha Abadi Jaya Gempol Sari Subang.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fikrman, F., Mita, F. K., & Setiono, S. (2021). The Role of Cooperatives as a Source of Facilitators in the World of Agriculture. *Baselang*, 1(2), 92–98.
- Firdaus, M. A., Ristiawati, R., & Saphira, S. (2021). Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 424–441.
- Firmando, H. B. (2021). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengembangan Sektor Perdagangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Tapanuli Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 107–131.
- Hermawati, F. (2021). *Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Perspektif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014.* UIN SMH BANTEN.
- Muammar, N. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontossunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar).* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Ryan, J. (2021). *Relasi Pusat Dan Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19: Studi Tentang Tarik Menarik Kepentingan Di Provinsi DKI Jakarta.* UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Salamun, A. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan pada Yayasan Baitul Hikmah dengan Model Context-Input-Proses-Product. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 85–100.
- Saraswati, E., Rizqiyah, R., & Randikaparsa, I. (2021). Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Rumah Kreatif BUMN” Purbalingga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 26–33.
- Sunardi, D. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari’ah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(1).
- Suparna Wijaya, S. E., & Ramadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behaviour.* Media Sains Indonesia.
- Wibowo, P. H. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)